



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DESTRY DAMAYANTI**
2. Jabatan : **DEPUTI GUBERNUR SENIOR**
3. NHK : **427785**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 13.668.840.000

1. Tanah Seluas 336 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN ,
HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
2. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA ,
HASIL SENDIRI Rp. 208.000.000
3. Bangunan Seluas 38 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA ,
HASIL SENDIRI Rp. 208.000.000
4. Bangunan Seluas 105 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000
5. Tanah Seluas 1087 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 400.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/187 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
7. Bangunan Seluas 34.4 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 1.500.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 247 m2/247 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.900.000.000
9. Bangunan Seluas 2500 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL
SENDIRI Rp. 252.840.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 1.150.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 6.000.000



2. MOBIL, TOYOTA VELLFIRE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. LAINNYA, LITESPEED ROAD BIKE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
4. LAINNYA, DAHON SEPEDA LIPAT Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
5. LAINNYA, PACIFIC SEPEDA LIPAT LISTRIK Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.200.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	13.515.705.868
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	4.642.115.741
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	36.177.161.609
III. HUTANG	Rp.	2.119.272.805
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	34.057.888.804

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.